

ANALISIS SENGKETA PAJAK PPN ATAS TANGGUNG RENTENG PADA PT RTS OLEH MUC CONSULTING

NABILA HIDAYATUNNISA



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH VOKASI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2024**

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

PERNYATAAN MENGENAI LAPORAN PROYEK AKHIR DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa laporan proyek akhir dengan judul “Analisis Sengketa Pajak PPN atas Tanggung Renteng pada PT RTS oleh MUC Consulting” adalah karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir laporan proyek akhir ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Juni 2024

Nabila Hidayatunnisa
J0314201111

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

ABSTRAK

NABILA HIDAYATUNNISA. Analisis Sengketa Pajak PPN atas Tanggung Renteng pada PT RTS oleh MUC Consulting. Dibimbing oleh AULIA HIDAYATI.

PT RTS mengajukan banding ke Pengadilan Pajak atas surat keputusan keberatan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang isinya mengabulkan sebagian dari yang diajukan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pokok sengketa banding yang diajukan oleh PT RTS, menjabarkan mekanisme pengajuan banding, menguraikan proses banding, menganalisis hasil putusan banding, dan mengevaluasi sengketa pajak PT RTS terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini yakni pokok sengketa banding PT RTS ialah atas Koreksi Pajak Masukan yang Tidak Dilaporkan Lawan Transaksi senilai Rp53.248.567,00. Pengajuan banding diawali dengan penerbitan surat banding oleh PT RTS lalu DJP menerbitkan surat uraian banding kemudian PT RTS menerbitkan surat bantahan sebagai balasan atas surat uraian banding tersebut. Proses banding diawali dengan sidang formal dilanjutkan dengan sidang kedua membahas matriks lalu sidang ketiga sampai sidang keenam membahas materi sidang lalu sidang ketujuh kedua pihak mengemukakan pendapat akhir dan ditutup dengan Majelis Hakim mengumumkan hasil putusan di sidang ucap. Hasil keputusan dari sidang banding PT RTS ialah Majelis Hakim mengabulkan seluruh banding PT RTS. Berdasarkan hasil evaluasi, PT RTS telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata kunci: Banding, Pajak, Sidang

ABSTRACT

NABILA HIDAYATUNNISA. Analysis of VAT Tax Dispute on Joint Liability of PT RTS by MUC Consulting. Supervised by AULIA HIDAYATI.

PT RTS has filed an appeal to the Tax Court against the objection decision letter issued by the Directorate General of Taxes (DGT), which partially granted the appeal. This research provides an explanation of the subject matter, describe the appeal mechanism and process, analyze the appeal decision, and evaluate the tax dispute of PT RTS against relevant laws and regulations. The research uses qualitative methods, including interviews, documentation, and literature study. The main dispute in PT RTS's appeal is focused on the Correction of Input Tax Not Reported by the Opposite Transaction, with an amount of Rp53,248,567.00. The appeal process began with the issuance of a letter of appeal by PT RTS, followed by a description letter from the DGT, and a subsequent rebuttal letter from PT RTS. Formal hearings were conducted, ranging from the second to the sixth hearing, addressing the matrix and material of the hearing. The seventh hearing involved both parties expressing their final opinions, and the Panel of Judges announced their decision, ultimately granting PT RTS's entire appeal. Based on the evaluation, it is concluded that PT RTS has adhered to applicable laws and regulations.

Keywords: Appeal, Hearing, Tax



Judul Proyek Akhir : Analisis Sengketa Pajak PPN atas Tanggung Renteng
pada PT RTS oleh MUC Consulting
Nama : Nabila Hidayatunnisa
NIM : J0314201111

@Hak cipta milik IPB University

Pembimbing:
Aulia Hidayati, S.E., M.Ak.

Disetujui oleh

Diketahui oleh

Ketua Program Studi:
Ratih Pratiwi, S.E., M.Ak.
NIP 201807198706232001

Dekan Sekolah Vokasi:
Dr. Ir. Aceng Hidayat, M.T.
NIP 196607171992031003



Tanggal Ujian: 19 Juni 2024

Tanggal Lulus:

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah subhanaahu wa ta'ala atas segala karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam pelaksanaan magang yang dilaksanakan sejak bulan Agustus 2023 sampai bulan Februari 2024 ini ialah perpajakan, dengan judul “Analisis Sengketa Pajak PPN atas Tanggung Renteng pada PT RTS oleh MUC Consulting”.

Terima kasih penulis ucapkan kepada:

1. Orang tua penulis, Ayahanda Widayanto dan Ibunda Eni Kusriani yang selalu memberikan dukungan, doa, serta kasih sayangnya.
2. Ibu Ratih Pratiwi, S.E., M.Ak selaku Ketua Program Studi Akuntansi.
3. Ibu Aulia Hidayati, S.E., M.Ak selaku dosen pembimbing.
4. Seluruh konsultan, staf, dan teman-teman magang divisi *Tax Dispute* MUC Consulting yang telah membantu dan menemani penulis selama masa magang.
5. Teman-teman penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan dan bagi kemajuan ilmu pengetahuan..

Bogor, Juni 2024

Nabila Hidayatunnisa

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	x
I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan	3
1.4 Manfaat	3
II TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1 Pajak	4
2.2 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	4
2.3 Tanggung Renteng	5
2.4 Sengketa Pajak	5
2.5 Keberatan	6
2.6 Banding	7
III METODE PENELITIAN	11
3.1 Gambaran Objek Penelitian	11
3.2 Teknik Pengumpulan Data	11
3.3 Teknik Analisis Data	11
IV HASIL DAN PEMBAHASAN	13
4.1 Pokok Sengketa Banding PT RTS	13
4.2 Mekanisme Pengajuan Banding	17
4.3 Proses Banding	22
4.4 Hasil Putusan Banding	24
4.5 Evaluasi Sengketa Pajak PT RTS	26
V SIMPULAN	30
5.1 Simpulan	30
DAFTAR PUSTAKA	31
LAMPIRAN	33
RIWAYAT HIDUP	42

DAFTAR TABEL

1	Ringkasan Perhitungan SKPKB PT RTS	13
2	Ringkasan Perhitungan Surat Keberatan PT RTS	15
3	Daftar Kredit PPN yang Belum Dilaporkan Lawan Transaksi	16
4	Hasil Perhitungan Keputusan Keberatan	17
5	Pokok Sengketa Banding PT RTS	17
6	Ringkasan Perhitungan Surat Banding PT RTS	18
7	Daftar Pajak Masukan yang Tidak Dilaporkan Lawan Transaksi	19
8	Ringkasan Perhitungan Permohonan Banding	20
9	Daftar Temuan Faktur Pajak yang Dikoreksi	21
10	Ringkasan Perhitungan Matriks Sengketa PT RTS	23
11	Pokok Sengketa Banding	24
12	Hasil Perhitungan Putusan Majelis Hakim	25
13	Keputusan Majelis Hakim tentang PPN yang Masih Harus Dibayar	25
14	Evaluasi atas Mekanisme Pengajuan Banding PT RTS	26
15	Evaluasi Proses Banding PT RTS	28

DAFTAR GAMBAR

1	Proses Pemeriksaan Banding dengan Sidang Acara Biasa	9
2	Proses Pemeriksaan Banding Dengan Sidang Acara Cepat	10

DAFTAR LAMPIRAN

1	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang	34
2	Surat Keberatan	35
3	Surat Keputusan Keberatan	36
4	Surat Banding	37
5	Matriks Sengketa Pajak	38
6	Pendapat Akhir	39
7	Halaman Pertama Putusan Pengadilan Pajak	40
8	Halaman Terakhir Putusan Pengadilan Pajak	41